PENGARUH PENYULUHAN KEHUTANAN TERHADAP PERAN KEPEMIMPINAN INFORMAL DI LINGKUNGAN TAMAN NASIONAL GUNUNG CIREMAI PROVINSI JAWA BARAT

(Effect of Forestry Extension on The Role of Informal Leadership in the Surrounding Gunung Ciremai National Park West Java Province)

Suyadi¹, Sumardjo², Zaim Uchrowi² & Prabowo Tjitropranoto²

¹Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar,
Jalan Perintis Kemerdekaan Km 17,5 Makassar, Sulawesi Selatan Indonesia
E-mail: suyadi.wsd@gmail.com

²Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia,
Institut Pertanian Bogor, Gedung FEMA Wing 1 Lantai 5, Dramaga Bogor, Jawa Barat Indonesia
E-mail: sumardjo252@gmail.com; zaim_uchrowi@yahoo.com; prabowo26t@gmail.com

Diterima 16 November 2017, direvisi 20 Maret 2019, disetujui 2 April 2019.

ABSTRACT

Agroforestry farmers are generally less empowered and relatively poor. This is because of their dependance on government programs. Informal leaders are one of the driving factors to improve farmers' empowerment. The power of informal leaders' influence is in line with the level of leadership in affecting the empowerment of farmers. Informal leadership will have more impacts on agroforestry farmers when it is supported by optimal forestry extension. This study aims to analyze the influence of forestry extension on the role of informal leadership to the community surrounding the national park. The research was conducted in Kuningan and Majalengka Districts, West Java Province, which was held from July to October 2017. The method used was cluster random sampling technique with cluster location of agroforestry forest farmer group in the buffer zone of Gunung Ciremai National Park area. Data were collected by households survey on 310 agroforestry farmers. The results showed that informal leadership roles were low. This is due to the low support of forestry extension are indicated by forestry extension competency, activities, methods, materials and intensity of forestry extension. Factors of forestry extension agent's competencies and extension intensity have a major influence on the role of informal leadership.

Keywords: Forestry extension; informal leadership; national park.

ABSTRAK

Petani agroforestri pada umumnya kurang berdaya dan tergolong miskin. Hal ini terjadi karena ketergantungan mereka pada program pemerintah. Tokoh informal merupakan salah satu faktor penggerak untuk meningkatkan keberdayaan petani. Kekuatan pengaruh tokoh informal selaras dengan tingkat kepemimpinannya dalam memengaruhi keberdayaan petani. Kepemimpinan informal akan lebih berdampak pada petani agroforestri jika didukung penyuluhan kehutanan yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penyuluhan kehutanan terhadap peran kepemimpinan informal di lingkungan taman nasional. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Kuningan dan Majalengka Provinsi Jawa Barat. Penelitian dilaksanakan mulai bulan Juli sampai dengan Oktober 2017. Teknik sampling *cluster random sampling* dengan klaster lokasi kelompok tani hutan agroforestri di desa penyangga kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai. Data dikumpulkan melalui survei rumah tangga terhadap 310 orang anggota kelompok tani hutan agroforestri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepemimpinan informal tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya dukungan penyuluhan kehutanan yang diindikasikan dengan kompetensi penyuluh kehutanan, kegiatan, metode, materi dan intensitas penyuluhan kehutanan. Faktor kompetensi penyuluh kehutanan dan intensitas penyuluhan kehutanan berpengaruh besar terhadap peran kepemimpinan informal.

Kata kunci: Penyuluhan kehutanan; kepemimpinan informal; taman nasional

I. PENDAHULUAN

Petani agroforestri yang tinggal di lingkungan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) pada umumnya kurang berdaya dan tergolong miskin. Hal ini karena ketergantungan mereka pada program pemerintah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sebanyak 17,28 juta jiwa atau 62,25% dari 27,76 juta penduduk miskin tinggal dan hidup di pedesaan di dalam dan sekitar kawasan hutan (Badan Pusat Statistik, 2017). Desa-desa yang berbatasan dengan kawasan hutan pada umumnya merupakan kantung-kantung kemiskinan. Kondisi ini antara lain disebabkan karena masyarakat belum cukup mendapat akses ke sumber daya hutan untuk menopang kesejahteraannya.

Hal ini selaras dengan pernyataan Puspitojati, Darusman, Tarumingkeng, & Purnama (2012) dan Langat, Maranga, Aboud, & Cheboiwo (2016) yang menjelaskan bahwa masyarakat pedesaan sangat bergantung pada sumber daya hutan. Mereka tinggal dekat hutan, memungut hasil hutan, untuk dikonsumsi sendiri atau bekerja di dalam kawasan hutan.

Selaras dengan Adalina, Nurrochman, Darusman, & Sundawati (2015) dalam penelitiannya mengungkap bahwa masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan di sekitar Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) secara sosial relatif homogen, tingkat pendidikan formal rendah, dan rata-rata tingkat pendapatan responden sebesar Rp1.155.000,00 per bulan dan di bawah Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Jawa Barat maupun Provinsi Banten. Hal ini menggambarkan bahwa petani di lingkungan taman nasional masih tergolong belum sejahtera karena berpenghasilan rendah. Dalam kaitan ini, pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kehutanan merupakan jawaban kunci untuk mengoptimalkan akses pengelolaan sumber daya hutan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian juga dengan Handoko (2014) menjelaskan bahwa pembangunan hutan yang

berkelanjutan di Indonesia masih dihadapkan pada masalah-masalah berupa ketidakpastian pengelolaan, rendahnya kapasitas pengelolaan dan rendahnya penegakan hukum.

Keberdayaan petani agroforestri perlu ditingkatkan, agar mereka bisa lebih mandiri dan sejahtera. Upaya peningkatan keberdayaan petani agroforestri di lingkungan TNGC dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya, yang diduga adalah melalui peran kepemimpinan informal. Tokoh informal mempunyai pengaruh sebagai seorang pemimpin. Tokoh informal merupakan seorang pemimpin yang mampu memotivasi dan menggerakkan petani dalam berusaha tani agroforestri.

Tokoh informal merupakan sosok atau figur individu dalam masyarakat yang karena kelebihan yang dimiliki baik ilmu pengetahuan, kekayaan, keturunan, atau kedudukannya di tengah-tengah masyarakat, diakui dan diterima oleh warga masyarakat sebagai tokoh yang dihormati dan dipatuhi, sehingga tokoh informal tersebut mempunyai pengaruh yang kuat terhadap masyarakat. Kelebihan tokoh informal yang mempunyai pengaruh kuat tersebut seharusnya mampu menggerakkan dan memotivasi petani agroforestri di lingkungan taman nasional untuk melakukan perubahan perilakunya dalam rangka tujuan kehidupan yang lebih baik. Keterlibatan tokoh informal melalui peran kepemimpinannya menjadi sangat penting dalam meningkatkan keberdayaan petani agroforestri di lingkungan taman nasional.

Petani agroforestri yang tinggal di lingkungan taman nasional, pada umumnya masih patuh kepada pemimpin mereka. Patuh terhadap orang-orang yang ditokohkan, baik secara formal maupun informal. Hal ini dapat dilihat dari sikap hormat yang tinggi terhadap tokoh-tokoh dalam berbagai aspek kegiatan. Apa yang diperintahkan, disarankan, atau diharapkan oleh tokoh-tokoh mereka, umumnya dipatuhi dan dilaksanakan. Pada kondisi masyarakat yang seperti ini, tokoh

informal mempunyai peranan penting dalam proses pembangunan sumber daya manusia kehutanan yang mandiri.

Tokoh informal agar dapat menjalankan peran kepemimpinannya dengan baik dan senantiasa dipatuhi oleh anggota petani lainnya perlu menjaga integritas dan kapasitasnya. Peran kepemimpinan informal yang ada pada seorang tokoh dapat meningkat jika didukung dengan penyuluhan kehutanan. Dukungan penyuluhan kehutanan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu kegiatan penyuluhan kehutanan, kompetensi penyuluh kehutanan, metode penyuluhan kehutanan, materi penyuluhan kehutanan dan intensitas penyuluhan kehutanan. Pada dasarnya penyuluhan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sadar akan pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

Berdasarkan hal-hal di atas penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis pengaruh faktor-faktor penyuluhan kehutanan terhadap peran interpersonal kepemimpinan informal, 2) menganalisis pengaruh faktor-faktor penyuluhan kehutanan terhadap peran informasional kepemimpinan informal, dan 3) menganalisis pengaruh faktor-faktor penyuluhan kehutanan terhadap peran pengambilan keputusan kepemimpinan informal di lingkungan TNGC Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan program dan strategi penyuluhan kehutanan yang berbasis pada tokoh informal. Program dan strategi tersebut khususnya dalam upaya peningkatan kapasitas petani di lingkungan kawasan hutan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan sejak bulan Juli sampai dengan Oktober 2017 dengan menggunakan desain survei. Lokasi penelitian di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat atas dasar keberadaannya di lingkungan kawasan TNGC yang merupakan kawasan konservasi. Unit analisis dalam penelitian ini adalah petani agroforestri. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 1.043 petani agroforestri. Populasi merupakan anggota kelompok tani hutan (KTH) agroforestri yang tinggal di desa-desa penyangga kawasan TNGC. Teknik sampling menggunakan *cluster random sampling* dengan kluster lokasi kelompok tani hutan agroforestri. Jumlah responden penelitian ini sebanyak 310 orang responden, terdiri dari 191 orang responden di Kabupaten Kuningan dan 119 orang responden di Kabupaten Majalengka.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan membuat kuesioner (daftar pertanyaan), melakukan pengamatan (observasi) langsung di lapangan dan wawancara mendalam baik dengan petani ataupun dengan informan lainnya. Data sekunder diperoleh dari berbagai kantor/instansi terkait. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan regresi. Pengolahan dan analisis data menggunakan bantuan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 22.

Peubah bebas penelitian ini adalah Penyuluhan Kehutanan (X), yang meliputi lima indikator yaitu kegiatan penyuluhan kehutanan (X_1), kompetensi penyuluh kehutanan (X_2), metode penyuluhan kehutanan (X_3), materi penyuluhan kehutanan (X_4), dan intensitas penyuluhan kehutanan (X_5). Sedangkan peubah tidak bebasnya yaitu peran Kepemimpinan Informal (Y), yang meliputi indikator peran interpersonal (Y_1), peran informasional (Y_2), dan peran pengambilan keputusan (Y_3).

Data sebaran populasi dan sampel penelitian secara rinci disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sebaran responden menurut lokasi dan nama KTH di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka tahun 2017

Table 1. Distribution of respondents by location and name of forest farmer groups in Kuningan Districts and Majalengka Districts of 2017

Lokasi (Location)		Kelompok Tani Hutan (Forest Farmer Group)	Responden (Respondents)	
Kabupaten (District)	Kecamatan (Sub Districts)			Desa (Village)
Kuningan	Pesawahan	Kaduela	Arya Kemuning	20
		Pesawahan	Karang Deket	20
	Mandirancan	Seda	Bukit Hijau	16
		Trijaya	Agroforestri	18
	Cilimus	Cibeureum	Ratu Asih	10
		Setianagara	Setia Tani	13
		Bandorasa Kulon	Bhakti Mandiri	20
	Jalaksana	Sangkanherang	Sangkan Rindang	15
		Sukamukti	Sukamukti	5
	Cigugur	Puncak	Harapan Mulya	13
	Darma	Sagarahiang	Sagarahiang I	16
		Gunung Sirah	Serba Guna I	25
				191
Majalengka	Cikijing	Kancana	Samapta	10
	Talaga	Gunung Manik	Giri Rahayu	19
	Banjaran	Sunia Baru	Mekar Rahayu	20
	Rajagaluh	Teja	Landeuh	19
		Payung	Sadesari	18
	Sindang Wangi	Bantar Agung	Citra Agung Mandiri	14
	Sindang	Gunung Kuning	Putra Mandiri	19
				119
Jumlah Total (Total amount)				310

Sumber (Source): Pusat Penyuluhan BP2SDM LHK (2016). Data diolah (Data processed)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kepemimpinan Informal di Lingkungan Taman Nasional Gunung Ciremai

Kepemimpinan informal diindikasikan dengan peran interpersonal, peran informasional, dan peran pengambilan keputusan. Peran interpersonal kepemimpinan informal relatif rendah (40,0%) dan sangat rendah (16,1%), hal ini seperti yang dijelaskan pada Tabel 2. Rendahnya peran interpersonal kepemimpinan informal di lingkungan TNGC, dilihat dari rendahnya kehadiran tokoh pada acara-acara masyarakat, sebagai panutan dan sifat mengayomi. Dilihat juga dari kemampuan membagi tugas, memimpin

dan menggerakkan masyarakat, hubungan baik dengan penyuluh atau pihak lain demi kepentingan masyarakat khususnya petani agroforestri.

Peran informasional kepemimpinan informal tergolong rendah (44,2%) dan sangat rendah (24,2%). Rendahnya peran informasional ini dilihat dari lemahnya kemampuan tokoh informal dalam mencari informasi sesuai kebutuhan petani. Tokoh informal juga kurang menjadi sumber informasi bagi petani, tempat bertanya dan berdiskusi serta sebagai juru bicara dalam berbagai persoalan petani. Dilihat juga dari kemampuannya dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan sesuai

Tabel 2. Sebaran petani agroforestri menurut peran kepemimpinan informal dan kategorinya di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka tahun 2017
Table 2. Distribution of agroforestry farmers according to the role of informal leadership and its category in Kuningan District and Majalengka District of 2017

Peran kepemimpinan informal (<i>The roles of informal leadership</i>)	Kategori* (<i>Category</i>)	Jumlah sampel (<i>Number of samples</i>)	% (<i>%</i>)
Peran interpersonal (<i>Interpersonal roles</i>)	Sangat rendah	50	16,1
	Rendah	124	40,0
	Tinggi	94	30,3
Rataan skor (<i>Averages scores</i>) : 47,2	Sangat tinggi	42	13,5
Peran informasional (<i>Informasional roles</i>)	Sangat rendah	75	24,2
	Rendah	137	44,2
	Tinggi	66	21,3
Rataan skor (<i>Average scores</i>): 45,1	Sangat tinggi	32	10,3
Peran pengambilan keputusan (<i>Decision roles</i>)	Sangat rendah	66	21,3
	Rendah	130	41,9
	Tinggi	95	30,6
Rataan skor (<i>Average scores</i>): 43,7	Sangat tinggi	19	6,1

Keterangan selang skor (*Description of score range*) 0-100. *) Kategori (*Category*) 0-25 sangat rendah (*very low*), 26-50 rendah (*low*), 51-75 tinggi (*high*), 76-100 sangat tinggi (*very high*)

Sumber (*Source*): Data diolah (*Data processed*)

kebutuhan petani, kemampuan memecahkan masalah petani, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi petani.

Peran pengambilan keputusan kepemimpinan informal tergolong rendah (41,9%) dan sangat rendah (21,3%). Rendahnya peran pengambilan keputusan tersebut dilihat dari aktivitas usaha yang ditekuni oleh tokoh informal, kemampuan mengatasi perselisihan warga petani dan pemecahan persoalan yang dihadapi petani, kemampuan dalam mencari fasilitas modal usaha, aktivitas dalam pengembangan usaha tani dan kemampuan bernegosiasi dengan pihak lain demi kepentingan petani.

Gambaran sebaran petani agroforestri menurut peran kepemimpinan informal di Kabupaten Kuningan dan Majalengka tahun 2017 secara rinci dapat di lihat pada Tabel 2.

Tokoh informal berperan dalam memfasilitasi antara keinginan dari masyarakat setempat dengan pihak pemerintah atau swasta. Tokoh informal

menjadi pendorong bagi masyarakatnya dalam mengelola hutan agar tidak merusak dan mendorong pemerintah agar memperhatikan kemauan dan kepentingan petani. Tokoh informal juga berperan menjadi juru bicara atau wakil masyarakat dalam menyampaikan keinginan kepada pemerintah, demikian juga sebaliknya. Hal ini selaras dengan Suprayitno, Gani, & Sugihen (2011) yang menyatakan bahwa tokoh masyarakat sekitar hutan kemiri dapat memainkan peranan penting dalam memotivasi masyarakat atau petani sekitar hutan untuk melestarikan hutan.

Suhendi (2013) menjelaskan bahwa seorang yang ditokohkan biasanya memiliki sifat keteladanan. Artinya dapat dijadikan contoh dan diteladani sifat-sifat baiknya. Oleh karena itu dalam ajaran kepemimpinan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa seorang pemimpin yang baik harus memiliki tiga sifat utama yaitu *ing ngarsa sung tuladha*, *ing madya mangun karsa*, dan *tut wuri handayani*. Hal yang demikian

tentunya harus dimiliki pula pada mereka yang ditokohkan oleh masyarakat. Banyak alasan mengapa seseorang dianggap sebagai tokoh dalam masyarakat, di antaranya adalah karena pendidikan, pekerjaan, kekayaan, keahlian, keturunan, dan lain-lain. Namun berbagai faktor yang menjadi latar belakang seseorang menjadi tokoh tidak akan baik kalau dalam dirinya tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Oleh karena itu kemampuan memengaruhi orang lain merupakan perpaduan yang baik jika digabungkan dengan faktor-faktor ketokohan yaitu pendidikan, pekerjaan, kekayaan, keahlian, atau keturunan. Semakin banyak seseorang memiliki atribut tersebut ditambah jiwa kepemimpinan dan keteladanan, maka orang tersebut akan semakin ditokohkan.

Tokoh informal di tengah-tengah komunitas masyarakat desa yang paternalistik, mempunyai potensi besar untuk dapat memainkan peran kepemimpinannya. Hal ini mengingat bahwa konsep dasar dari kepemimpinan adalah kemampuan memengaruhi orang lain untuk menjadi pengikutnya. Seperti yang dikemukakan oleh Soekanto (2013) bahwa kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan dari seseorang (yaitu pemimpin atau *leader*) untuk memengaruhi orang lain (yaitu orang yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya), sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Melalui kepemimpinan tokoh informal, potensi kemudahan untuk melakukan perubahan perilaku masyarakat sekitar hutan ke arah yang lebih baik adalah lebih besar.

Kepemimpinan adalah merupakan interaksi antara pemimpin dan pengikut yang saling memengaruhi dalam rangka mencapai suatu tujuan organisasi (Avolio, Sosik, Kahai, & Baker, 2014; Cameron, 2011; Raharjo & Nafisah, 2006; Brahmasari & Suprayetno, 2008). Kepemimpinan merupakan suatu proses hubungan memengaruhi atau mengarahkan (dari pemimpin) dan hubungan kepatuhan-ketaatan

(partisipasi) para pengikut/bawahan secara sadar karena dipengaruhi oleh kewibawaan pemimpin dalam bekerja sama melalui cara pemberian visi, pemberian semangat, antusiasme, kasih, kepercayaan, kegiatan, nafsu, obsesi, konsistensi, penggunaan simbol, perhatian mencapai sebuah visi atau serangkaian tujuan yang direncanakan untuk mencapai tujuan organisasi (Meitha & Sasmito, 2016). Sudarwan dalam Sudaryono (2014) menjelaskan bahwa kepemimpinan sering diberi makna sebagai derajat keberpengaruhan, sedangkan pemimpin adalah orang yang paling potensial memberi pengaruh. Lebih lanjut dijelaskan bahwa faktor-faktor dalam kepemimpinan adalah pemimpin, pengikut, situasi, dan komunikasi. Mintzberg dalam Arifin (2015), Sudaryono (2014) dan Sillong, Mohamad, Hassan, & Ariff (2008) mengelompokkan 10 peran pemimpin ke dalam tiga kategori yaitu peran interpersonal, peran informasional dan peran pengambilan keputusan.

Van den Ban & Hawkins (1999), mengemukakan bahwa tokoh masyarakat mempunyai pengaruh yang besar terhadap cara berpikir dan bertani masyarakat setempat. Pengaruh yang besar seorang tokoh masyarakat dalam masyarakatnya antara lain (a) sebagai penerus informasi dari luar kelompok masyarakat, (b) sebagai penafsir informasi dari luar atas dasar pendapat dan pengalamannya sendiri, (c) sebagai pemberi contoh untuk ditiru bagi masyarakat sekitarnya, (d) sebagai pengukuh atau penolak suatu perubahan dari luar atau pelegitimasi suatu perubahan, (e) berpengaruh dalam mengubah norma kelompok masyarakat.

Sebaran petani agroforestri menurut peran kepemimpinan informal (Tabel 2) memperkuat pendapat Liow, Laloma, & Pesoth (2015), yaitu pemimpin tidak resmi atau informal *leader* selalu saja dapat ditemui pada setiap komunitas. Meskipun tidak memiliki surat keputusan pengangkatan sebagaimana lazimnya pemimpin formal pada lembaga swasta maupun pemerintah, namun

kepemimpinan informal *leader* sangat efektif dalam menjalankan kepemimpinannya, yaitu kemampuannya untuk memengaruhi (*influence*) orang lain untuk bertindak atau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan si pemimpin itu sendiri. Kuatnya pengaruh yang dimiliki pemimpin informal berkaitan dengan proses kemunculannya yang didasarkan atas kemauan dari anggota kelompok atau orang-orang yang dipimpinnya, karena memiliki kelebihan kelebihan tertentu dan berorientasi pada kepentingan anggota kelompok. Dengan demikian maka wajar apabila loyalitas anggota kelompok tidak diragukan lagi. Selaras juga dengan yang dinyatakan oleh Mutmainah & Sumardjo (2014) bahwa pemimpin kelompok memiliki peranan yang sangat penting dalam mengelola kelompok taninya. Peran pemimpin kelompok meliputi kemampuan pemimpin dalam memberikan arahan dan tuntunan bagi anggota kelompoknya, mampu memfasilitasi agar tercapai tujuan, mampu mendinamiskan para anggota untuk aktif, dan mampu dalam menampung aspirasi anggota kelompoknya.

B. Penyuluhan Kehutanan di Lingkungan Taman Nasional Gunung Ciremai

Penyuluhan kehutanan di lingkungan TNGC diindikasikan dengan kegiatan penyuluhan kehutanan, kompetensi penyuluh kehutanan, metode penyuluhan kehutanan, materi penyuluhan kehutanan dan intensitas penyuluhan kehutanan. Manfaat kegiatan penyuluhan kehutanan bagi petani agroforestri tergolong rendah (26,8%) dan sangat rendah (47,1%) (Tabel 3). Kegiatan penyuluhan kehutanan yang diselenggarakan oleh pemerintah pada umumnya masih bersifat keproyekan dan sekedar mengejar target program pemerintah. Kegiatan penyuluhan kehutanan yang diselenggarakan belum sesuai dengan kebutuhan petani dalam pengembangan usahatani agroforestri. Pada prinsipnya kegiatan tersebut diterima dan direspon dengan baik oleh petani agroforestri di lingkungan TNGC di wilayah Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka, namun

petani agroforestri belum dapat merasakan manfaat dari kegiatan penyuluhan yang pernah diikuti yaitu pertemuan kelompok tani hutan, pelatihan keterampilan, nonton film penyuluhan, atau studi banding. Kegiatan-kegiatan tersebut cenderung jarang dilakukan.

Kompetensi penyuluh kehutanan dalam menjalankan tugas dan fungsi penyuluhan di lingkungan TNGC tergolong rendah (39,4%) dan sangat rendah (19,0%). Rendahnya kompetensi penyuluh kehutanan ini dilihat dari kemampuan penyuluh kehutanan dalam menggali informasi atau permasalahan yang dihadapi petani. Dilihat juga dari kemampuannya dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan sesuai kebutuhan petani, kemampuan memecahkan masalah petani, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi petani.

Ketepatan metode penyuluhan kehutanan yang digunakan oleh penyuluh kehutanan tergolong rendah (38,1%) dan sangat rendah (38,1%) (Tabel 3). Rendahnya ketepatan metode penyuluhan kehutanan yang digunakan tersebut dilihat dari aktivitas penyuluh kehutanan dengan ceramah, diskusi/tanya jawab, kunjungan lapangan/studi banding, sekolah lapang, pemberian buku atau majalah. Hal ini sejalan dengan Diniyati & Achmad (2016) yang menyatakan bahwa penyuluhan dengan metode ceramah dan diskusi tentang pengembangan kapulaga di hutan rakyat terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan petani.

Kesesuaian materi penyuluhan kehutanan yang disampaikan kepada petani agroforestri di lingkungan TNGC tergolong tinggi (29,0%) dan sangat tinggi (23,5%). Hal ini dilihat dari kesesuaian materi penyuluhan kehutanan dengan kebutuhan petani agroforestri, pengetahuan baru yang diperoleh petani, keterampilan dan penerapan ilmu oleh petani.

Intensitas penyuluhan kehutanan yang dilakukan oleh penyuluh kehutanan tergolong rendah (41,6%) dan sangat rendah (43,9%) (Tabel 3). Intensitas rendah sama artinya dengan penyuluhan kehutanan jarang

Tabel 3. Sebaran petani agroforestri menurut faktor penyuluhan kehutanan dan kategorinya di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka Tahun 2017

Table 3. Distribution of agroforestry farmers according to forestry extension factor and its category in Kuningan District and Majalengka District of 2017

Faktor penyuluhan kehutanan (Forestry extension factor)	Kategori* (Category)	Jumlah sampel (Number of samples)	% (%)
Kegiatan penyuluhan kehutanan (Forestry extension activities)	Sangat rendah	83	26,8
	Rendah	146	47,1
	Tinggi	66	21,3
	Sangat tinggi	15	4,8
Rataan skor (Average scores): 36,8			
Kompetensi penyuluh kehutanan (Competencies of forestry extension agent)	Sangat rendah	59	19,0
	Rendah	122	39,4
	Tinggi	94	30,3
	Sangat tinggi	35	11,3
Rataan skor (Average scores): 44,8			
Metode penyuluhan kehutanan (Method of forestry extension)	Sangat rendah	118	38,1
	Rendah	118	38,1
	Tinggi	58	18,7
	Sangat tinggi	16	5,2
Rataan skor (Average scores): 34,3			
Materi penyuluhan kehutanan (Material of forestry extension)	Sangat rendah	58	18,7
	Rendah	89	28,7
	Tinggi	90	29,0
	Sangat tinggi	73	23,5
Rataan skor (Average scores): 53,9			
Intensitas penyuluhan kehutanan (Intensity of forestry extension)	Sangat rendah	136	43,9
	Rendah	129	41,6
	Tinggi	34	11,0
	Sangat tinggi	11	3,5
Rataan skor (Average scores): 29,4			

Keterangan selang skor (Description of score range) 0-100. *) Kategori (Category) 0-25 sangat rendah (very low), 26-50 rendah (low), 51-75 tinggi (high), 76-100 sangat tinggi (very high)

Sumber (Source): Data diolah (Data processed)

dilakukan. Hal ini dilihat dari kegiatan pertemuan kelompok tani hutan, keterlibatan petani pada kegiatan penyuluhan di luar desanya, dan kehadiran penyuluh kehutanan di lokasi usaha/kebun petani. Gambaran tentang sebaran petani agroforestri menurut dukungan penyuluhan kehutanan di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka tahun 2017 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.

Petani agroforestri berdomisili di desa-desa penyangga kawasan TNGC di wilayah Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka. Lembaga pengelola kawasan TNGC dalam hal ini Balai Taman Nasional Gunung Ciremai dan pemerintah kabupaten setempat mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan

kehutanan. Dari hasil wawancara mendalam diperoleh penjelasan bahwa intensitas penyuluhan kehutanan ini rendah karena belum terjalin koordinasi dan kerja sama yang optimal antara lembaga Balai Taman Nasional Gunung Ciremai dengan lembaga penyuluhan pemerintah daerah setempat. Penyuluh kehutanan pada pemerintah daerah setempat memandang bahwa penyelenggaraan penyuluhan kehutanan di wilayah desa penyangga kawasan taman nasional adalah menjadi tanggungjawab lembaga pengelola kawasan taman nasional. Sedangkan jumlah tenaga penyuluh kehutanan pada balai taman nasional relatif sangat sedikit yaitu hanya terdapat tiga orang penyuluh pegawai negeri sipil (PNS) untuk wilayah kerja Kabupaten

Kuningan, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Cirebon.

Van den Ban & Hawkins (1999) menjelaskan bahwa penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar. Penyuluhan dalam arti umum adalah ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Penyuluhan dapat diartikan sebagai suatu sistem pendidikan yang bersifat non-formal di luar sistem sekolah yang biasa (Setiana, 2012). Menurut Sumardjo dalam Anwas (2013) bahwa filosofi dan prinsip-prinsip penyuluhan dalam arti yang sebenarnya adalah partisipatif, dialogis, konvergen, dan demokratis, sehingga memberdayakan dan bukannya praktik-praktik penyuluhan yang bersifat *top-down*, *linier* dan bertentangan dengan filosofi pembangunan manusia. Penyuluhan harus mampu menumbuhkan cita-cita yang melandasi untuk selalu berfikir kreatif dan dinamis, mengacu kepada kenyataan yang ditemukan di lapangan atau harus selalu disesuaikan dengan keadaan di lapangan.

Kegiatan penyuluhan adalah kegiatan mendidik (Asngari, 2001), maka penyuluh harus mampu berperan sebagai pendidik untuk mengubah perilaku masyarakat sasaran. Terdapat tiga peran utama penyuluh dalam pengelolaan usahatani, yaitu pendidik/edukator, fasilitator dan mediator. Peran penyuluh sebagai pendidik dititikberatkan kepada peran penyuluh dalam meningkatkan kapasitas petani dalam pengelolaan usahatani, baik kapasitas manajerial, sosial maupun teknis melalui proses pembelajaran. Penyuluh sebagai fasilitator berperan untuk mendorong dan membantu petani dalam pengambilan keputusan usahatani yang efektif dan efisien. Peran penyuluh sebagai mediator dimaksudkan sebagai aktivitas penyuluh untuk menjembatani para pihak dalam pengelolaan usahatani dengan cara

memberi saran, memberi pertimbangan dan memberi pemahaman terhadap permasalahan yang dihadapi (Suprayitno, Gani, & Sugihen, 2012).

Terkait dengan peran penyuluh kehutanan dalam upaya mengubah perilaku petani, maka penyuluh kehutanan haruslah mempunyai kualitas yang baik. Kualitas penyuluh kehutanan dapat diukur melalui kompetensi-kompetensi yang dimiliki. Penyuluh kehutanan yang berkualitas adalah seorang penyuluh kehutanan yang kompeten di bidangnya. Kompetensi penyuluh kehutanan dapat dilihat melalui penguasaan materi yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya dapat pula dilihat melalui ketepatan penggunaan metode penyuluhan, intensitas penyuluhan, teknik komunikasi dan pendekatan penyuluhan.

C. Pengaruh Penyuluhan Kehutanan terhadap Peran Interpersonal

Penyuluhan kehutanan yang diindikasikan melalui kegiatan penyuluhan kehutanan, kompetensi penyuluh kehutanan, metode penyuluhan kehutanan, materi penyuluhan kehutanan dan intensitas penyuluhan kehutanan secara serentak berpengaruh besar terhadap peran interpersonal kepemimpinan informal di lingkungan TNGC. Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan jika ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya, akan berkontribusi terhadap peningkatan peran interpersonal kepemimpinan informal. Secara interpersonal tokoh informal akan menjadi sosok atau figur yang lebih dihormati dan dipatuhi. Hal ini diukur melalui kehadiran tokoh pada acara masyarakat, panutan dan sifat mengayomi, pembagian tugas, memimpin dan menggerakkan masyarakat, hubungan baik dengan penyuluh atau pihak lain demi kepentingan masyarakat.

Pengaruh penyuluhan kehutanan terhadap peran interpersonal kepemimpinan informal di lingkungan taman nasional, dibuktikan melalui uji regresi. Secara bersamaan faktor-

Tabel 4. Koefisien regresi pengaruh faktor penyuluhan kehutanan terhadap peran interpersonal kepemimpinan informal

Table 4. The regression coefficients of the effect of forestry extension factor on the interpersonal role of informal leadership

Faktor Penyuluhan Kehutanan (Forestry Extension Factor)	Koefisien regresi (Regression coefficient)	Signifikansi (Significance)
Konstanta (Constant)	25,766	0,000
Kegiatan penyuluhan kehutanan (Forestry extension activities)	-0,122	0,093
Kompetensi penyuluh kehutanan (Competencies of forestry extension agent)	0,207	0,028*
Metode penyuluhan kehutanan (Method of forestry extension)	0,010	0,925
Materi penyuluhan kehutanan (Material of forestry extension)	0,069	0,428
Intensitas penyuluhan kehutanan (Intensity of forestry extension)	0,449	0,000**
Nilai (Value) R: 0.587		
Nilai (Value) R ² (R square) : 0.344		

Keterangan (Information) : *) Nyata pada taraf 0,05 (Significant at the 0.05 level), **) Sangat nyata pada taraf 0,01 (Very significant at the 0.01 level)

Sumber (Source): Data diolah (Data processed)

faktor penyuluhan kehutanan yang terdiri dari kegiatan penyuluhan kehutanan, kompetensi penyuluh kehutanan, metode penyuluhan kehutanan, materi penyuluhan kehutanan dan intensitas penyuluhan kehutanan memiliki kontribusi sebesar 34,4% (Tabel 4) dalam menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel peran interpersonal kepemimpinan informal. Sedangkan sisanya sebesar 65,6% (Tabel 4) dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Koefisien regresi pengaruh penyuluhan kehutanan terhadap peran interpersonal kepemimpinan informal secara rinci tersaji pada Tabel 4.

Berdasarkan uji regresi, diperoleh bentuk persamaan pengaruh variabel penyuluhan kehutanan terhadap peran interpersonal kepemimpinan informal sebagai berikut:

$$Y_1 = 25,766 + (-0,122X_1) + 0,207X_2 + 0,010X_3 + 0,069X_4 + 0,449X_5; R^2 = 0,344$$

Di mana, Y_1 = Peran interpersonal kepemimpinan informal; X_1 = Kegiatan

penyuluhan kehutanan; X_2 = Kompetensi penyuluh kehutanan; X_3 = Metode penyuluhan kehutanan; X_4 = Materi penyuluhan kehutanan; X_5 = Intensitas penyuluhan kehutanan; R^2 = Kemampuan model untuk menjelaskan perilaku atau peran interpersonal kepemimpinan informal.

Secara parsial terlihat bahwa faktor kegiatan penyuluhan kehutanan, metode penyuluhan kehutanan, dan materi penyuluhan kehutanan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel peran interpersonal kepemimpinan informal. Sedangkan kompetensi penyuluh kehutanan, dan intensitas penyuluhan kehutanan secara statistik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel peran interpersonal kepemimpinan informal. Hal ini dapat diartikan bahwa peningkatan kompetensi penyuluh kehutanan dan intensitas penyuluhan kehutanan akan dapat meningkatkan peran interpersonal kepemimpinan informal. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Suprayitno

et al. (2011) yang menyatakan bahwa model efektif meningkatkan tingkat partisipasi petani adalah dengan meningkatkan kemampuan dan diberi kesempatan berpartisipasi. Tokoh informal dalam menjalankan fungsi dan peran kepemimpinannya perlu dijaga bahkan ditingkatkan kemampuannya. Tokoh informal yang memiliki kemampuan memadai, maka peran kepemimpinan interpersonalnya akan berfungsi lebih baik.

D. Pengaruh Penyuluhan Kehutanan terhadap Peran Informasional

Pengaruh penyuluhan kehutanan terhadap peran informasional kepemimpinan informal di lingkungan TNGC, melalui uji regresi dibuktikan bahwa secara bersamaan faktor-faktor penyuluhan kehutanan yang terdiri dari kegiatan penyuluhan kehutanan, kompetensi penyuluh kehutanan, metode penyuluhan kehutanan, materi penyuluhan kehutanan dan intensitas penyuluhan kehutanan memiliki kontribusi sebesar 36,6% (Tabel 5) dalam menjelaskan perubahan yang terjadi pada

variabel peran informasional kepemimpinan informal. Sedangkan sisanya sebesar 63,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan secara kuantitas maupun kualitas jika ditingkatkan akan berkontribusi terhadap peningkatan peran informasional kepemimpinan informal. Peran informasional ini dibuktikan dengan kemampuan tokoh informal dalam mencari informasi sesuai kebutuhan petani. Tokoh informal juga menjadi sumber informasi bagi petani, tempat bertanya dan berdiskusi serta sebagai juru bicara dalam berbagai persoalan melalui kemampuannya dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan sesuai kebutuhan petani, kemampuan memecahkan masalah petani, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi petani.

Koefisien regresi pengaruh penyuluhan kehutanan terhadap peran informasional kepemimpinan informal secara rinci tersaji pada Tabel 5.

Berdasarkan uji regresi, diperoleh bentuk persamaan pengaruh faktor-faktor penyuluhan

Tabel 5. Koefisien regresi pengaruh faktor penyuluhan kehutanan terhadap peran informasional kepemimpinan informal

Table 5. The regression coefficients of the effect of forestry extension factor on the informational role of informal leadership

Faktor penyuluhan kehutanan (<i>Forestry extension factor</i>)	Koefisien regresi (<i>Regression coefficient</i>)	Signifikansi (<i>Significance</i>)
Konstanta (<i>Constant</i>)	21,398	0,000
Kegiatan penyuluhan kehutanan (<i>Forestry extension activities</i>)	0,096	0,179
Kompetensi penyuluhan kehutanan (<i>Competencies of forestry extension</i>)	0,274	0,003**
Metode penyuluhan kehutanan (<i>Method of forestry extension</i>)	0,021	0,844
Materi penyuluhan kehutanan (<i>Material of forestry extension</i>)	-0,055	0,521
Intensitas penyuluhan kehutanan (<i>Intensity of forestry extension</i>)	0,333	0,000**
Nilai (<i>Value</i>) R: 0.605		
Nilai (<i>Value</i>) R ² (<i>R square</i>): 0.366		

Keterangan (*Information*): *) Nyata pada taraf 0,05 (*Significant at the 0.05 level*), **) Sangat nyata pada taraf 0,01 (*Very significant at the 0.01 level*)

Sumber (*Source*): Data diolah (*Data processed*)

kehutanan terhadap peran informasional kepemimpinan tokoh informal sebagai berikut:

$$Y_2 = 21,398 + (0,096X_1) + 0,274X_2 + 0,021X_3 + (-0,055X_4) + 0,333X_5 ; R^2 = 0,366$$

Di mana, Y_2 = Peran informasional kepemimpinan tokoh informal; X_1 = Kegiatan penyuluhan kehutanan; X_2 = Kompetensi penyuluh kehutanan; X_3 = Metode penyuluhan kehutanan; X_4 = Materi penyuluhan kehutanan; X_5 = Intensitas penyuluhan kehutanan; R^2 = Kemampuan model dalam menjelaskan perilaku atau Peran informasional kepemimpinan tokoh informal.

Secara parsial faktor-faktor penyuluhan kehutanan yang secara nyata berpengaruh terhadap peran informasional kepemimpinan tokoh informal adalah faktor kompetensi penyuluh kehutanan dan intensitas penyuluhan kehutanan. Sedangkan faktor kegiatan penyuluhan kehutanan, metode penyuluhan kehutanan, dan materi penyuluhan kehutanan secara statistik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel peran informasional kepemimpinan informal. Hal ini dapat diartikan bahwa peningkatan kompetensi penyuluh kehutanan dan intensitas penyuluhan kehutanan akan dapat meningkatkan peran informasional kepemimpinan informal.

Wahyuni, Sumardjo, Lubis, & Sadono (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa individu yang berperan sebagai kunci penyebar informasi adalah orang yang memiliki keberdayaan informasi yang dapat disebarluaskan kepada individu lain. Tokoh informal sebagai seorang pemimpin termasuk dalam kategori kunci penyebar informasi. Demikian pula dengan Rushendi, Sarwoprasodjo & Mulyandari (2016) menyatakan bahwa faktor kredibilitas sumber informasi yang memengaruhi keputusan adopsi adalah tingkat kepercayaan dan kompetensi sumber informasi dari sesama petani, kelembagaan yang ada, penyuluh, dan staf kebun percobaan. Tokoh informal

merupakan salah satu sumber informasi bagi petani. Kredibilitas tokoh informal merupakan hal yang perlu dijaga, agar dapat dipercaya oleh petani atas informasi-informasi yang disampaikan. Hal ini juga sesuai dengan penelitian Sawerah, Muljono, & Tjitropranoto (2016) yang menyatakan bahwa tokoh masyarakat berperan dalam menyebarluaskan informasi-informasi yang diperlukan masyarakat dan memberikan dukungan-dukungan sosial. Demikian juga sesuai dengan hasil penelitian Ruhimat (2015) yang menyatakan bahwa tingkat intensitas peran penyuluh dan tingkat dukungan pihak luar secara bersama-sama berpengaruh cukup kuat terhadap tingkat ketersediaan informasi dalam peningkatan kapasitas petani dalam pengelolaan hutan rakyat.

Dukungan penyuluhan kehutanan merupakan faktor penting dalam meningkatkan peran kepemimpinan tokoh informal di lingkungan taman nasional. Melalui penyuluhan kehutanan yang tepat, integritas tokoh informal lebih terjaga dan bahkan meningkat. Tokoh informal juga memperoleh banyak informasi yang bermanfaat bagi petani. Dalam kondisi seperti ini, tokoh informal lebih mampu menjadi teladan dan sumber informasi bagi petani agroforestri di lingkungan taman nasional. Hal ini sejalan dengan Suradisatra & Priyanto (2011) yang menjelaskan bahwa peran ketokohan adalah sebagai motivator/penggerak dalam memengaruhi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan/program yang dirancang di suatu wilayah, karena dipandang sebagai panutan dan disegani (dituakan). Lebih lanjut dijelaskan, bahwa setiap kegiatan kolektif masyarakat tidak pernah luput dari perhatian tokoh kepemimpinan lokal, baik pemimpin formal maupun informal.

E. Pengaruh Penyuluhan Kehutanan terhadap Peran Pengambilan Keputusan

Penyuluhan kehutanan yang diindikasikan melalui faktor kegiatan penyuluhan kehutanan, kompetensi penyuluh kehutanan, metode

penyuluhan kehutanan, materi penyuluhan kehutanan dan intensitas penyuluhan kehutanan secara serentak berpengaruh besar terhadap peran pengambilan keputusan kepemimpinan informal di lingkungan TNGC.

Secara bersamaan kontribusi pengaruh faktor-faktor penyuluhan kehutanan terhadap peran pengambilan keputusan kepemimpinan informal di lingkungan taman nasional sebesar 28,7% (Tabel 6) dalam menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel peran pengambilan keputusan kepemimpinan informal. Sedangkan sisanya sebesar 71,3% (Tabel 6) dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Hal ini berarti bahwa peningkatan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan penyuluhan kehutanan, akan berkontribusi terhadap peningkatan peran pengambilan keputusan kepemimpinan informal. Peningkatan peran pengambilan keputusan tersebut diukur dari aktivitas usaha yang ditekuni oleh tokoh informal, kemampuan mengatasi perselisihan warga petani dan pemecahan persoalan yang dihadapi petani,

kemampuan dalam mencari fasilitas modal usaha, aktivitas dalam pengembangan usaha tani dan kemampuan bernegosiasi dengan pihak lain demi kepentingan petani. Tokoh informal akan lebih memiliki jiwa *entrepreneurship* untuk membawa kelompok menjadi unggul. Tokoh informal akan lebih jeli untuk mengalokasikan sumber daya dalam kelompok dan efektif.

Koefisien regresi pengaruh penyuluhan kehutanan terhadap peran pengambilan keputusan kepemimpinan informal secara rinci tersaji pada Tabel 6. Berdasarkan uji regresi, diperoleh bentuk persamaan pengaruh variabel penyuluhan kehutanan terhadap peran pengambilan keputusan kepemimpinan tokoh informal adalah sebagai berikut:

$$Y_3 = 25,013 + 0,046X_1 + 0,0318X_2 + (-0,035X_3) + (-0,052X_4) + 0,307X_5 ; R^2 = 0,287$$

Di mana, $Y_3 = X_1$ = Kegiatan penyuluhan kehutanan; X_2 = Kompetensi penyuluh kehutanan; X_3 = Metode penyuluhan

Tabel 6. Koefisien regresi pengaruh faktor penyuluhan kehutanan terhadap peran pengambilan keputusan kepemimpinan informal

Table 6. The regression coefficients of the effect of forestry extension factor on the decision role of informal leadership

Faktor Penyuluhan Kehutanan (Forestry Extension Factor)	Koefisien regresi (Regression coefficient)	Signifikansi (Significance)
Konstanta (Constant)	25,013	0,000
Kegiatan penyuluhan kehutanan (Forestry extension activities)	0,046	0,548
Kompetensi penyuluhan kehutanan (Competencies of forestry extension)	0,318	0,001**
Metode penyuluhan kehutanan (Method of forestry extension)	-0,035	0,758
Materi penyuluhan kehutanan (Material of forestry extension)	-0,052	0,571
Intensitas penyuluhan kehutanan (Intensity of forestry extension)	0,307	0,000**
Nilai (Value) R : 0.536		
Nilai (Value) R ² (R square) : 0.287		

Keterangan (Information) : *) Nyata pada taraf 0,05 (Significant at the 0.05 level), **) Sangat nyata pada taraf 0,01 (Very significant at the 0.01 level)

Sumber (Source): Data diolah (Data processed)

kehutanan; X_4 = Materi penyuluhan kehutanan; X_5 = Intensitas penyuluhan kehutanan; R^2 = Kemampuan model dalam menjelaskan perilaku atau Peran pengambilan keputusan kepemimpinan informal.

Secara parsial pada Tabel 6 terlihat bahwa kegiatan penyuluhan kehutanan, metode penyuluhan kehutanan, dan materi penyuluhan kehutanan secara statistik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel peran pengambilan keputusan kepemimpinan informal. Sedangkan kompetensi penyuluh kehutanan, dan intensitas penyuluhan kehutanan secara statistik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel peran Informasional kepemimpinan informal.

Hal ini dapat diartikan bahwa peningkatan kompetensi penyuluh kehutanan dan intensitas penyuluhan kehutanan akan dapat meningkatkan peran pengambilan keputusan kepemimpinan tokoh informal. Hasil ini sejalan dengan penelitian Ruhimat (2013) yang menyatakan bahwa aspek dukungan pemerintah merupakan aspek paling penting dan dominan yang akan memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan kesatuan pengelolaan hutan (KPH). Pemerintah dalam hal ini melalui dukungan penyuluhan kehutanan diharuskan mengubah pendekatan pengelolaan kehutanan yang awalnya menempatkan masyarakat sebagai obyek menjadi subyek pembangunan dan pengelolaan sektor kehutanan di Indonesia. Perubahan pendekatan pengelolaan ini akan menjadikan peran pengambilan keputusan kepemimpinan tokoh informal menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan kapasitas petani agroforestri di lingkungan taman nasional. Sejalan juga dengan Mutmainah & Sumardjo (2014), yang menyatakan bahwa pemimpin kelompok memiliki peranan yang sangat penting dalam mengelola kelompok taninya. Peran pemimpin kelompok meliputi kemampuan pemimpin dalam memberikan arahan dan tuntunan bagi anggota kelompoknya, mampu memfasilitasi agar tercapai tujuan, mampu mendinamiskan

para anggota untuk aktif, dan mampu dalam menampung aspirasi anggota kelompoknya.

Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan yang dalam hal ini diperankan oleh penyuluh kehutanan sebagai wakil pemerintah selaras dengan Suherdi, Amanah, & Muljono (2014) yang memberikan gambaran bahwa peran penyuluh kehutanan paling dominan sebagai penasihat, yaitu lebih banyak memberikan gagasan/ide dan masukan kepada petani, sedangkan keputusan atas tindakan yang akan dilakukan tergantung kepada petani itu sendiri. Peran penyuluh berikutnya sebagai fasilitator, yaitu membantu petani memberikan kemudahan melakukan usaha hutan rakyatnya. Peran penyuluh sebagai guru yaitu melakukan kegiatan pengajaran kepada petani. Penelitian ini juga sejalan dengan Sumarlan, Sumardjo, Tjitropranoto, & Gani (2012) yang menjelaskan bahwa rendahnya dukungan penyuluhan kehutanan menyebabkan rendahnya kesempatan dan lemahnya motivasi petani sekitar hutan dalam penerapan sistem agroforestri. Hal ini dapat memengaruhi lemahnya keberlanjutan sistem agroforestri dan juga peran kepemimpinan tokoh informal.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Peran interpersonal kepemimpinan informal di lingkungan TNGC rendah. Tokoh informal belum mampu menjadi sosok atau figur yang lebih dihormati dan dipatuhi, memimpin dan menggerakkan anggota petani agroforestri, serta menjalin hubungan baik dengan pihak lain.

Peran informasional kepemimpinan informal di lingkungan TNGC rendah. Tokoh informal belum mampu mencari informasi sesuai kebutuhan petani. Tokoh informal belum mampu menjadi sumber informasi bagi petani agroforestri, tempat bertanya dan berdiskusi serta sebagai juru bicara dalam berbagai persoalan petani agroforestri.

Peran pengambilan keputusan

kepemimpinan informal di lingkungan TNGC rendah. Tokoh informal belum mampu mengatasi perselisihan dan pemecahan persoalan yang dihadapi petani agroforestri. Tokoh informal belum mampu memfasilitasi atau mencari solusi modal usahatani. Tokoh informal belum mampu memfasilitasi pengembangan usahatani dan bernegosiasi dengan pihak lain demi kepentingan petani agroforestri. Tokoh informal belum memiliki jiwa *entrepreneurship* untuk membawa kelompok tani hutan menjadi unggul. Tokoh informal juga belum jeli dan efektif untuk mengalokasikan sumber daya dalam kelompok.

Rendahnya peran kepemimpinan informal di lingkungan TNGC, disebabkan oleh rendahnya kuantitas dan kualitas penyuluhan kehutanan yang diindikasikan dengan kegiatan penyuluhan kehutanan, kompetensi penyuluh kehutanan, metode penyuluhan kehutanan, materi penyuluhan kehutanan dan intensitas penyuluhan kehutanan. Dukungan penyuluhan kehutanan berpengaruh besar terhadap peran kepemimpinan informal di lingkungan TNGC. Semakin tinggi kuantitas dan kualitas penyelenggaraan penyuluhan kehutanan, maka akan semakin baik tokoh informal menjalankan peran kepemimpinannya. Pengaruh penyuluhan kehutanan terhadap peran kepemimpinan informal (interpersonal, informasional dan pengambilan keputusan) didominasi oleh faktor kompetensi penyuluh kehutanan dan intensitas penyuluhan kehutanan. Peningkatan kompetensi penyuluh kehutanan dan intensitas penyuluhan kehutanan akan berpengaruh besar terhadap peningkatan peran kepemimpinan informal.

B. Saran

Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan di lingkungan TNGC oleh institusi yang membidangi penyuluhan kehutanan agar lebih dioptimalkan terutama melalui peningkatan kompetensi penyuluh kehutanan dan intensitas penyuluhan kehutanan. Kompetensi penyuluh

kehutanan dapat ditingkatkan melalui pelatihan, seminar, atau *workshop*, sedangkan intensitas penyuluhan kehutanan dapat ditingkatkan dengan pertemuan kelompok, anjongsana (rumah dan kebun), studi banding, atau pelatihan keterampilan. Penyuluh kehutanan harus lebih disiplin dan tanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya. Setiap penyuluh kehutanan agar memiliki program penyuluhan yang dapat dijadikan kontrol dalam peningkatan intensitas penyuluhan kehutanan. Pendekatan terhadap tokoh informal agar lebih ditingkatkan melalui anjongsana dan diskusi non-formal, pelatihan keterampilan, dan pemberian kepercayaan untuk memimpin atau pengambilan keputusan.

Perlu adanya peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah (institusi yang membidangi penyuluhan kehutanan di daerah kabupaten atau provinsi) dengan pemerintah pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) sehingga bisa terjalin kerja sama yang lebih baik dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan kehutanan.

UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Kepala Balai Pengelolaan Hutan Wilayah V Provinsi Jawa Barat. Terima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penelitian ini, khususnya kepada para anggota kelompok tani hutan agroforestri di desa-desa penyangga kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka yang telah terlibat dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2017). *Statistik Indonesia 2017*. (Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik, Ed.). Jakarta (ID): BPS.
- Adalina, Y., Nurrochman, D. R., Darusman, D., & Sundawati, L. (2015). Kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar taman Nasional Gunung Halimun Salak. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*, 12(2), 105–118.
- Anwas, O. M. (2013). *Pemberdayaan masyarakat di era global*. Bandung (ID): Alfabeta.
- Arifin, B. S. (2015). *Psikologi sosial*. Bandung (ID): Pustaka Setia.
- Asngari, P. S. (2001). *Peranan agen pembaruan/ penyuluh dalam usaha memberdayakan (empowerment) sumber daya manusia pengelola agribisnis*. (Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Ilmu Sosial Ekonomi). Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Avolio, B. J., Sosik, J. J., Kahai, S. S., & Baker, B. (2014). E-leadership : Re-examining transformations in leadership source and transmission. *The Leadership Quarterly*, 25(1), 105–131. doi://10.1016/j.leaqua.2013.11.003
- Brahmasari, I. A., & Suprayetno, A. (2008). Pengaruh motivasi kerja, kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan serta dampaknya pada kinerja perusahaan (Studi kasus pada PT . Pei Hai International Wiratama Indonesia). *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 10(2), 124–135.
- Cameron, K. (2011). Responsible leadership as virtuous leadership. *Journal of Business Ethics*, 98(1), 25–35. <https://doi.org/10.1007/s10551-011-1023-6>
- Diniyati, D., & Achmad, B. (2016). Pengaruh penyuluhan terhadap pengembangan kapulaga di hutan rakyat: Kasus di Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya, Jawa Barat. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 13(1), 25–36.
- Handoko, C. (2014). Some problems in maintaining sustainability of Indonesia's forests: Descriptive study. *Indonesian Journal of Forestry Research*, 1(1), 33–46.
- Langat, D. K., Maranga, E. K., Aboud, A. A., & Cheboiwo, J. K. (2016). Role of forest resources to local livelihoods: The case of East Mau forest ecosystem, Kenya. *International Journal of Forestry Research*, 2016 (ID 4537354), 1–10. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1155/2016/4537354>
- Liow, M. R., Laloma, A., & Pesoth, W. (2015). Peranan pemimpin informal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Malola. *JAP*, III(31), 1–9.
- Meitha, A., & Sasmito, C. (2016). Pengaruh kepemimpinan, kedisiplinan dan komunikasi terhadap pelayanan publik di Puskesmas Kabupaten Sambas. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(3), 109–114.
- Mutmainah, R., & Sumardjo. (2014). Peran kepemimpinan kelompok tani dan efektivitas pemberdayaan petani. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 2(3), 182–199.
- Puspitojati, T., Darusman, D., Tarumingkeng, R. C., & Purnama, B. (2012). Pemangku kepentingan yang perlu diberdayakan dalam pengelolaan hutan produksi: Studi kasus di Kesatuan Pemangkuan Hutan Bogor. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 9(3), 190–204.
- Raharjo, S. T., & Nafisah, D. (2006). Analisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja, komitmen organisasi dan kinerja karyawan (Studi empiris pada Departemen Agama Kabupaten Kendal dan Departemen Agama Kota Semarang). *Jurnal Studi Manajemen dan Organisasi*, 3(2), 69–81.
- Ruhimat, I. S. (2013). Model peningkatan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan kesatuan pengelolaan hutan: Studi kasus di KPH model Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 10(3), 255–267.
- Ruhimat, I. S. (2015). Model peningkatan kapasitas petani dalam pengelolaan hutan rakyat: Studi di Desa Ranggung, Kalimantan Selatan. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*, 4(1), 11–21.
- Rushendi, Sarwoprasodjo, S., & Mulyandari, R. S. H. (2016). Pengaruh saluran komunikasi interpersonal terhadap keputusan adopsi inovasi pertanian bioindustri integrasi Serai Wangi-Ternak di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Agro Ekonomi*, 34(2), 135–144.
- Sawerah, S., Muljono, P., & Tjitropranoto, P. (2016). Partisipasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran lahan gambut di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Penyuluhan*, 12(1), 89–102.
- Setiana, L. (2012). *Teknik penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sillong, A. D., Mohamad, D. M., Hassan, Z., & Ariff, I. (2008). Changing roles and competencies of effective public sector leadership. *Jurnal Pengurusan Awam*, (1), 27–46.
- Soekanto, S. (2013). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta (ID): Rajawali Pers.
- Sudaryono. (2014). *Leaderships teori dan praktek kepemimpinan*. Jakarta (ID): Lentera Ilmu Cendekia.

- Suhendi, A. (2013). Peranan tokoh masyarakat lokal dalam pembangunan kesejahteraan sosial. *Informasi*, 18(2), 105–116.
- Suherdi, Amanah, S., & Muljono, P. (2014). Motivasi petani dalam pengelolaan usaha hutan rakyat Desa Cingambul, Kecamatan Cingambul, Majalengka. *Jurnal Penyuluhan*, 10(1), 85–93.
- Sumarlan, Sumardjo, Tjitropranoto, P., & Gani, D. S. (2012). Peningkatan kinerja petani sekitar hutan dalam penerapan sistem agroforestri di Pegunungan Kendeng Pati. *Jurnal Agro Ekonomi*, 30(1), 25–39.
- Suprayitno, A. R., Gani, D. S., & Sugihen, B. G. (2011). Model peningkatan partisipasi petani sekitar hutan dalam pengelolaan hutan kemiri rakyat. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 8(3), 176–195.
- Suprayitno, A. R., Gani, D. S., & Sugihen, B. G. (2012). Motivasi dan partisipasi petani dalam pengelolaan hutan kemiri di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Penyuluhan*, 9(2), 182–196.
- Suradisatra, K., & Priyanto, D. (2011). Pemberdayaan posisi dan peran tokoh tradisional dalam upaya pengembangan ternak di Provinsi Banten. *WARTAZOA*, 21(2), 51–59.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Van den Ban, A. W., & Hawkins, H. S. (1999). *Penyuluhan pertanian*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wahyuni, S., Sumardjo, Lubis, D. P., & Sadono, D. (2017). Hubungan jaringan komunikasi dan dinamika kelompok dengan kapasitas petani dalam agribisnis padi organik di Jawa Barat. *Jurnal Penyuluhan*, 13(1), 110–120